

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN
PENUTUPAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian
studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :
UMI FADILLAH
NPM. 5117500291**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI
SEPT 2021**

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

Oleh :

UMI FADILLAH
NPM 5117500291

Telah diuji dan dipertahankan dihadapan Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :

Hari : Jum'at
Tanggal : 19 Februari 2021

Penguji I



TIYAS VIKA WIDYASTUTI, S.H., M.H
NIDN. 0619058703

Penguji II



H. TONHARYADI, S.H., M.H
NIDN. 0020045801

Pembimbing I



FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H
NIDN. 0608087702

Pembimbing II



IMAM ASMARUDIN, S.H., M.H
NIDN. 0625058106

Mengetahui
Dekan,
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN
PENUTUPAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI**

Disusun Oleh :

**UMI FADILLAH
NPM. 5117500291**

**Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal :**

Pembimbing I


FAJAR DIAN ARYANI, S.H., M.H
NIDN. 0608087702

Pembimbing II


IMAM ASMARUDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

**PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **UMI FADILLAH**

NPM : **5117500291**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Izin Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Saya menyerahkan skripsi dan hasil penelitian didalamnya menjadi milik fakultas hukum Universitas Pancasakti Tegal serta memberikan ijin untuk merecovery dan mempublikasikan dalam bentuk jurnal baik atas nama saya ataupun tidak melibatkan saya.

Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap karya saya ini.

Tegal, 24 Maret 2021

Yang menyatakan

UMI FADILLAH

MOTTO

Boleh jadi kamu membeci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi mu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

{QS. Al-Baqarah 216}

Sabar bukan tentang berapa lama kau bisa menunggu.
Melainkan bagaimana perilakumu saat menunggu.

{Imam Bin Al Qayim}

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
- ❖ Bapak dan Ibu Orang Tuaku, Bapak dan Ibu Mertua, suami beserta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dalam setiap sujud, dan setiap saat yang tak pernah bosan memberikan cinta kasihnya, dorongan, semangat.
- ❖ Almamaterku Universitas Pancasakti Tegal

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya. Dalam menyelesaikan Skripsi ini, Penulis meyakini dengan sepenuhnya tidak akan dapat menyelesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd selaku Rektor Universitas Pancasakti beserta Para Wakil Rektor.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
4. H. Toni Haryadi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Keuangan, Administrasi Umum dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.

5. Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
6. Muhammad Wildan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti.
7. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) dalam skripsi ini yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bantuan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I Ujian Skripsi yang memberikan masukan terhadap skripsi ini.
10. H. Toni Haryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II Ujian Skripsi yang memberikan masukan terhadap skripsi ini.
11. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, atas bantuan dan ilmu yang sangat berguna selama mengikuti proses belajar atas bimbingan, kritik dan saran, serta ilmu yang sangat berharga.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.

Dengan penuh harap dan iringan do'a, semoga jasa kebaikan beliau sekalian diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhir kata, karya ilmiah ini penulis haturkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya

saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi sempurnanya karya ilmiah ini.

Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Swt. Amin.

Wassallamu alaikum, Wr. Wb

Tegal, 24 Maret 2021

Penulis

UMI FADILLAH

ABSTRAK

UMI FADILLAH, 5117500291, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN IZIN PENUTUPAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI

Penelitian ini dilakukan di wilayah mejasem kabupaten tegal dengan objek penelitian adalah masyarakat yang melakukan penutupan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan penutupan jalan yang bersifat pribadi di wilayah mejasem kabupaten tegal. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan memaparkan secara deskriptif hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dengan menutup jalan di wilayah Mejasem Kabupaten Tegal. Dilakukan untuk kegiatan pesta pernikahan, khitanan, dan kegiatan lainnya. Namun pelaksanaan penutupan jalan tersebut belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana sebagian besar penutupan jalan yang dilakukan tidak memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh Polri. akibatnya terjadi kemacetan di sekitar lokasi penutupan jalan karena dilakukan tidak sesuai prosedur yang telah ditetapkan. kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh polri dan pemerintah, lemahnya kesadaran hukum masyarakat wilayah mejasem kabupaten tegal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan menutup jalan di wilayah Mejasem Kabupaten Tegal.

Kata kunci: penggunaan jalan, kegiatan lalu lintas, penutupan jalan

ABSTRACT

UMI FADILLAH, 5117500291, A JURIDICAL REVIEW OF THE GRANTING OF ROAD CLOSURE PERMITS FOR PERSONAL GAIN

This research was conducted in the tegal regency mejasem area with the object of the study is a community that conducts road closures in addition to personal traffic activities. This research was conducted by conducting direct observations on the implementation of road closures that are private in the tegal regency mejasem area. The approach taken is a qualitative approach by descriptively presenting the results.

The results of this study showed that the implementation of road use other than for traffic activities by closing roads in the Mejasem area of Tegal Regency. Done for wedding activities, circumcision, and other activities. However, the implementation of the road closure has not been carried out in accordance with applicable laws and regulations where most road closures carried out do not have written permits issued by the Police. As a result, there is congestion around the location of road closures because it is not in accordance with established procedures. Lack of maximum monitoring carried out by the police and government, weak legal awareness of the tegal regency, and applicable laws and regulations become factors that affect the implementation of road use other than for personal traffic activities by closing roads in the Mejasem area of Tegal Regency..

Keywords: road use, traffic activities, road closures

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Kata Pengantar	vii
Abstrak	x
Abstract	xi
Daftar Isi	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi	14

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	16
A. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Jalan	16
B. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Yang Bersifat Pribadi Dengan Penutupan	22
C. Tinjauan Umum Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pelaksanaan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang bersifat Pribadi dengan Penutupan Jalan di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal	47
B. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Penggunaan Jalan selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang bersifat Pribadi dengan Penutupan Jalan di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal	57
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
Daftar Pustaka	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah transportasi atau perhubungan merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh negara-negara yang telah maju dan juga oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Selain permasalahan transportasi, kegiatan pembangunan juga mempengaruhi perencanaan pengaturan Lalu Lintas. Selain permasalahan transportasi, kegiatan pembangunan juga mempengaruhi perencanaan pengaturan Lalu Lintas¹. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasinya. Transportasi adalah pergerakan manusia, barang dan informasi dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, cepat, murah dan sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.² Lebih lanjut ditambahkan bahwa timbulnya transportasi berdasarkan pada persoalan :

1. Kebutuhan manusia akan barang, jasa dan informasi dalam proses kehidupannya.
2. Barang, jasa dan informasi tidak berada dalam satu kesatuan dengan tempat tinggalnya.

Dua hal pokok tersebut menyebabkan terjadinya arus manusia, barang dan informasi dari suatu zona asal menuju ke zona tujuan melalui

¹ Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta, hlm. 3.

² *Ibid.* hlm. 1

berbagai prasarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.² Dalam kehidupan saat ini, manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya hanya dari tempat tinggalnya saja. Pemenuhan kebutuhan tersebut mengakibatkan terjadinya arus pergerakan sehingga muncul permasalahan transportasi.

Jalan raya merupakan suatu infrastruktur transportasi darat (dalam bentuk apapun), meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Bangunan pelengkap ini meliputi gedung-gedung pemerintahan (kantor polisi, pos polisi, rumah sakit, dan lain sebagainya) dan perlengkapan seperti (lampu traffic light, pagar penghalang kereta api, rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya). Selain itu jalan mempunyai peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

Pasal 1 ayat (12) dijelaskan, bahwa Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel³.

Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan

³ Pasal 1 ayat 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ini terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Dan yang terakhir adalah ruang pengawasan jalan, yang merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan ini terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Dan yang terakhir adalah ruang pengawasan jalan, yang merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

Bagian jalan tersebut merupakan bagian-bagian yang sangat vital bagi pengguna jalan. Bila bagian jalan tersebut terganggu oleh masyarakat yang menyelenggarakan acara untuk kepentingan pribadinya, tentu fungsi jalan tidak tercapai secara optimal. Hal ini juga akan menimbulkan kekacauan bagi para pengguna jalan yang melintas. Tidak dibenarkan orang atau masyarakat yang melakukan suatu perbuatan yang dapat mengganggu fungsi jalan.

Hal ini sudah sangat jelas diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan;
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan;
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Penyelenggaraan jalan yang dilakukan oleh negara memiliki beberapa tujuan yang tentunya berpihak kepada rakyat, dan memberi kemudahan bagi rakyat untuk melakukan berbagai macam aktivitasnya. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tujuan dari pengaturan penyelenggaraan jalan adalah:

1. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
2. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
3. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
4. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
5. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
6. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan bahwa jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Jalan merupakan salah satu fasilitas publik yang sangat vital bagi warga masyarakat. Namun, di samping itu, banyak sekali aktifitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Pelanggaran-pelanggaran itu di antaranya adalah pelanggaran dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan menutup jalan, seperti pelaksanaan atau penyelenggaraan acara resepsi pernikahan, acara khitanan, atau acara-acara perayaan tertentu yang sudah menjadi kebudayaan warga masyarakat Indonesia umumnya warga masyarakat. Namun, di samping itu, banyak sekali aktifitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan. Pelanggaran-pelanggaran itu di antaranya adalah pelanggaran dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan menutup jalan, seperti pelaksanaan atau penyelenggaraan acara resepsi pernikahan, acara khitanan, atau acara-acara perayaan tertentu yang sudah menjadi kebudayaan warga masyarakat Indonesia umumnya

Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas tidak terealisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah pesta pernikahan digelar di Jalan **Semanggi raya Mejasem Kabupaten Tegal**. Sebuah tenda dibangun dengan menggunakan seluruh badan jalan. Hal ini mengakibatkan lalu lintas di ruas jalan tersebut terganggu. Tidak hanya karena adanya tenda, namun penyelenggara acara juga tidak menginformasikan adanya tenda di ujung jalan. Akibatnya banyak pengguna jalan yang terkecoh dan tetap masuk ke **Jalan Semanggi raya Mejasem Kabupaten Tegal** dan harus memutar balik. Dikarenakan ruas jalan yang sempit, Pengguna kendaraan roda empat terpaksa harus mundur karena tidak ada area untuk berputar, seharusnya jika hal ini di bantah maka akan di berikan sanksi administratif.

Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagai akibat dari penutupan jalan harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara yang bisa dipindahkan dan/atau menempatkan petugas. Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, pejabat yang berwenang memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas⁴.

Pada dasarnya, penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi diperbolehkan mengacu pada pasal 28 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ PP No. 43 Tahun 1993 Pasal 89 Ayat 3

Namun, selain itu disebutkan pula bahwa Penggunaan jalan yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan hanya jika ada jalan alternatif dan penutupan jalan tersebut harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.

Penggunaan jalan untuk acara resepsi pernikahan atau kegiatan lainnya seperti disebutkan di atas termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, yang mengatakan bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Selain, untuk kegiatan lalu lintas, yang mengatakan bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

Penutupan jalan untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai aturan, seperti tidak adanya jalan alternatif atau rambu-rambu sementara pengalihan jalan yang tidak memadai, salah satu faktor penyebabnya adalah tidak sedikit masyarakat yang tidak memiliki izin untuk menggunakan jalan sebagaimana dimaksud di atas. Misalnya penyelenggaraan pesta pernikahan yang menghalangi jalan raya termasuk

dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, kegiatan ini mempunyai beberapa syarat untuk mendapatkan izin. Tetapi banyak yang menutup jalan tanpa adanya izin dari pihak kepolisian dengan alasan acara tersebut hanya diadakan beberapa hari saja. Hal tersebut yang dapat mengakibatkan kemacetan dan inilah salah satu tindakan masyarakat yang tidak mematuhi hukum.

Hal ini dapat disebabkan oleh fakta di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait dengan pelanggaran penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas seperti yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas saat ini belum berjalan maksimal. Dengan demikian penegakan hukum dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas perlu penanganan secara lebih serius oleh pihak-pihak yang terkait. Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas saat ini belum berjalan maksimal. Dengan demikian penegakan hukum dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas perlu penanganan secara lebih serius oleh pihak-pihak yang terkait.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penggunaan jalan selain lalu lintas yang bersifat pribadi dengan menutup jalan di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penggunaan jalan selain lalu lintas yang bersifat pribadi di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penggunaan jalan selain lalu lintas yang bersifat pribadi dengan menutup jalan di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal..

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan

masyarakat, khususnya dalam penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah guna pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan strategi penegakan hukum dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas dan mewujudkan masyarakat patuh hukum..

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran di dalam penegakan hukum guna mewujudkan masyarakat patuh hukum bagi aparat penegak hukum pada masa mendatang guna mewujudkan maupun terpeliharanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum.

E. Tinjauan Pustaka

Berikut penulis ilustrasikan/deskripsikan beberapa penelitian terkait dengan tema penelitian yang peneliti laksanakan sebagai berikut :

Penelitian Abdul Hafid Firdaus, 2019, yang berjudul Penutupan Akses Keluar Masuk Tetangga Ke Jalan Raya Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Agraria (Sengketa Lahan Di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang). Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang kasus penutupan akses tetangga ke jalan raya dengan menggunakan teori di dalam hukum Islam serta didalam hukum positif di

Indonesia, dan apakah penutupan jalan tersebut termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.

Penelitian Dimas Nugraha Ginting, 2019 yang berjudul “Tanggung Jawab Pemborong Dalam Pelaksanaan Pemborongan Bangunan”. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas mengenai implikasi hukum terhadap penutupan jalan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah serta kaitannya dengan asas kepentingan umum.

Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian tinjauan yuridis empiris khusus pada pemberian izin penutupan jalan untuk kepentingan pribadi dengan didasarkan pada pengkajian hasil penelitian di lapangan dengan memadukan bahan-bahan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang arah dan tujuannya untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Penelitian hukum empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan

hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan⁵.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.⁶ Metode deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu dalam memecahkan permasalahan.⁷

3. Sumber Data

Data yang terhimpun dari hasil penelitian ini, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, dapat digolongkan ke dalam dua jenis data, yaitu:

- a. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, karya tulis, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

⁵ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm 38, lihat juga Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, hlm. 19.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hlm. 97.

⁷ *Ibid*, hlm. 155.

- b. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan skripsi ini, pada lokasi penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan melalui metode :

- a) Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulis, serta data-data yang didapatkan dari penulisan melalui media internet atau media lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- b) Metode Penelitian Lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini⁸..

5. Metode Analisis Data

Setiap data yang bersifat teoritis baik berbentuk asas-asas, konsepsi dan pendapat para pakar hukum, termasuk kaidah atau norma hukum, akan dianalisa secara yuridis normatif dengan

⁸ Ulber Silalahi. *Metode Penelitian Sosial*. 2006. Bandung: Unpar Press. hlm. 287

menggunakan uraian secara deskriptif dan prespektif, yang bertitik tolak dari analisis kualitatif normatif dan yuridis empiris. Setelah penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti yang tersebut diatas, dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu menjelaskan menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Hasil wawancara/studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.⁹

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika yang digunakan dalam penulisan hukum ini terbagi dalam empat bab, yang masing-masing bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi diuraikan sebagai berikut:

BAB I Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini merupakan tinjauan konseptual yang berisi beberapa tinjauan umum mengenai penggunaan jalan, tinjauan umum tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat

⁹ *Ibid.* hlm. 128-129

pribadi dengan penutupan dan tinjauan umum tentang faktor yang mempengaruhi penegakan hukum..

BAB III Bab ini mengenai hasil penelitian upaya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa atas kegagalan bangunan pada proyek pembangunan di yayasan banas mandiri group dan tanggung jawab penyedia jasa konstruksi atas kegagalan bangunan pada proyek pembangunan di yayasan banas mandiri group.

BAB IV Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini dan berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Jalan

1. Pengertian Penggunaan Jalan

Pengertian penggunaan jalan terbagi atas dua kata yaitu dari kata “penggunaan” yaitu cara atau proses, perbuatan menggunakan sesuatu. Sedangkan jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan tol, dan jalan kabel.

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, di dalam Pasal 1 ayat (4) dijelaskan, bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menurut statusnya, jalan umum dikelompokkan:

- a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam 7 UU No. 38 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (4) Sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta

menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di kota.

- e. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sedangkan Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Jadi, penggunaan jalan adalah kegiatan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan baik yang menyangkut tentang penggunaan jalan untuk kegiatan lalu lintas maupun penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi.

2. Macam-macam Penggunaan Jalan

Adapun macam-macam penggunaan jalan terbagi atas 2 bagian yaitu;

- a. Penggunaan jalan untuk kegiatan lalu lintas,

Kegiatan lalu lintas merupakan kegiatan di ruas jalan yang diadakan dengan kegiatan pengadaan yang menggunakan rambu lalu lintas, marka jalan, alat isyarat rambu lalu lintas, dan alat-alat manajemen lalu lintas. Dimana lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan¹⁰.

Hal ini dilakukan adalah untuk pengaturan lalu lintas dalam lokasi pembangunan, gedung/bangunan dan agar tidak

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

mengganggu lalu lintas lingkungan. Manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas¹¹. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

Adapun kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud meliputi¹²:

- a) Inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan serta permasalahan lalu lintas pada ruas-ruas jalan, persimpangan dan jaringan jalan;
- b) Penetapan tingkat pelayanan ruas jalan yang diinginkan;
- c) Perumusan dan penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas;
- d) Penyusunan rencana dan program pelaksanaan.

Secara garis besar, kegiatan lalu lintas terbagi atas 2 bagian yaitu penggunaan jalan tanpa penutupan dan penggunaan jalan dengan penutupan. Penggunaan jalan tanpa penutupan adalah apabila penggunaan jalan selain kegiatan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut,

¹¹ PP No. 43 Tahun 1993 Pasal 2 Ayat 1

¹² PP No. 43 Tahun 1993 Pasal 2 Ayat 2

pejabat yang berwenang memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan yang dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas¹³, sedangkan penggunaan jalan dengan penutupan adalah apabila penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan.

Di dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dijelaskan mengenai penyelenggaraan kegiatan Lalu Lintas, yaitu:

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat. dan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
 - (a) urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - (b) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian

¹³ PP No. 43 Tahun 1993 Pasal 89 Ayat 3 13 PP No. 43 Tahun 1993 Pasal 89 Ayat 3

negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- (c) urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang industri;
- (d) urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi; dan
- (e) urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yaitu apabila penggunaan jalan dilakukan dengan menutup jalanan. Jika jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perkapolri 10/2012, izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan oleh Polri. Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan

permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan.

B. Tinjauan Umum Tentang Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Yang Bersifat Pribadi Dengan Penutupan

1. Dasar Hukum

Dasar hukum penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah Pasal 127 sampai Pasal 130 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Jalan dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Pada pasal 1 ayat 9 Perkapolri No. 22 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Sementara itu di dalam pasal 127 UU. No. 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas terbagi atas 2 bagian, yaitu;

- a. Penggunaan jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah dilakukan untuk penyelenggaraan: (1) Kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan dan ritual keagamaan; (2) Kegiatan Kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan; (3) Kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional dan internasional; dan (4) Kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran.
- b. Penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Penutupan jalan yang dilakukan oleh pengguna jalan yang bersifat pribadi terbagi atas 2 bagian yaitu:

- a. Penggunaan jalan tanpa penutupan.

Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan 12 Perkapolri No. 10 Tahun 2012 Pasal 16 penutupan jalan, maka pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan dan atau POLRI memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga

keselamatan dan kelancaran lalu lintas Dinas Perhubungan dan atau POLRI memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

b. Penggunaan jalan dengan penutupan.

Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012, izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan oleh POLRI. Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada Kapolda setempat, Kapolres/Kepolresta setempat, Kapolsek/Kapolsekta setempat, atau seperti yang tertera dalam Pasal 17 Ayat (2) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012. Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan yang sesuai dengan Pasal 17 Ayat (3) Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012.

Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa¹⁴. Izin penggunaan jalan ini akan diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di

¹⁴ Perkapolri No. 10 Tahun 2012 Pasal 15 Ayat 2

bidang lalu lintas dan angkutan jalan angkutan jalan¹⁵. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup¹⁶. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara¹⁷.

Berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan, alat pembatas kecepatan ditempatkan pada jalan di lingkungan permukiman, jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C, dan pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi. Bentuk Konstruksi alat pembatas kecepatan pun diatur pada Pasal 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yang berbunyi:

1. Bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan menyerupai trapesium dan bagian yang menonjol di atas badan jalan maksimum 12 cm.
2. Penampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kedua sisi miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15%.
3. Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), proporsional dengan bagian menonjol di atas badan jalan dan minimum 15cm.
4. Bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan sebagaimana dalam Lampiran gambar 1 keputusan ini.

¹⁵ PP No. 43 Tahun 1993 Pasal 1 Ayat 12

¹⁶ PP No. 43 Tahun 1993 Pasal 89 Ayat 1

¹⁷ Perkapolri No. 10 Tahun 2012 Pasal 15 Ayat 3

Salah satu contoh kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dan dengan menutup jalan adalah mengadakan pesta pernikahan. Pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan. Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas (“Perkapolri 10/2012”), penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Selain diatur dalam Perkapolri 10/2012, mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas juga diatur dalam Pasal 88 – Pasal 90 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Sementara itu, di dalam Pasal 129 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dijelaskan mengenai tanggung jawab yang dibebankan terkait dengan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas:

- (1) Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
- (2) Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Pengertian Izin

Izin merupakan salah satu bentuk keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata¹⁸.

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Pengertian izin menurut definisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang.

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemukakan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang

¹⁸ UU. No. 5 Tahun 1986 Pasal 1 ayat 3

sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin¹⁹. Sedangkan izin dalam arti sempit yani pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

Hal yang pokok pada izin adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkeankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan)²⁰.

Pengertian izin juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit. Dalam ketentuan tersebut izin dberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

¹⁹ N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, op. cit, hlm. 2-3

²⁰ *Ibid*

Pemberian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Berdasarkan hal tersebut, maka izin akan selalu berbentuk tertulis dan berisikan beberapa hal sebagai berikut²¹:

a. Organ yang berwenang

Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ berwenang dalam sistem perizinan, organ yang paling berbekal mengenai materi dan tugas bersangkutan, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan.

b. Yang Dialamatkan

Izin adalah keputusan suatu organ pemerintahan dalam suatu peristiwa konkret, ditujukan pada suatu pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Pada suatu keputusan bukan hanya keadaan yang dialamatkan (pemohon izin) yang penting, tetapi juga posisi dari pihak-pihak berkepentingan. Karena itu, keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin.

²¹ *Ibid.* hlm. 11-15

Pada suatu keputusan bukan hanya keadaan yang dialamatkan (pemohon izin) yang penting, tetapi juga posisi dari pihak-pihak berkepentingan.

c. Diktum

Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum, harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu diberikan. Bagian keputusan ini, di mana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan, dinamakan diktum, yang merupakan inti dari keputusan. Setidaknya diktum ini terdiri atas keputusan pasti, yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dituju oleh keputusan tersebut.

d. Alasan yang Mendasari Pemberiannya

Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta. Penyebutan ketentuan undang-undang memberikan pegangan kepada semua yang bersangkutan, organ penguasa dan yang berkepentingan, dalam menilai keputusan itu. Pertimbangan hukum merupakan hal penting bagi organ pemerintahan untuk memberikan atau menolak permohonan izin.

e. Ketentuan, Pembatasan, dan Syarat-syarat

Ketentuan-ketentuan adalah kewajiban-kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan-ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Dalam hal ketentuan-ketentuan tidak dipatuhi, terdapat pelanggaran izin. Tentang sanksi yang diberikan atasannya, pemerintahan harus memutuskannya tersendiri. Dalam pembuatan keputusan, termasuk keputusan berizi izin, dimasukkan pembatasan-pembatasan.

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan-keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan

yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Ini adalah paparan luas, dari pengertian izin. Sedangkan izin dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan)²².

Van der Pot, menyatakan bahwa izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan²³. Didalam hukum, istilah perizinan disebut juga dengan *vergunning*, dan tidaklah mudah untuk

²² N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, hlm. 2-3

²³ Pudyatmoko, Y. Sri, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, hlm. 7

memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan izin. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan²⁴.

E Utrecht, mengemukakan izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (*vergunning*)²⁵.

Pengertian izin juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen,

²⁴ N. M. Spelt dan J.B.J. Ten Berge, 1992, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yuridika Pratama, Surabaya, hlm. 1-2

²⁵ E. Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, hlm. 187.

sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan²⁶.

Hukum perizinan sendiri merupakan ketentuan yang berkaitan dengan pemberian izin atau bentuk lain yang berkaitan dengan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dengan pemberian izin tersebut melahirkan hak bagi pemegang izin baik terhadap seseorang, badan usaha, organisasi, LSM, dan sebagainya untuk beraktifitas²⁷. Pemerintah mengeluarkan izin untuk mengatur segala tindakan-tindakan yang terdapat dalam masyarakat, agar tidak bertentangan dengan segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Terkait dengan pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, di dalam pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Jalan dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas menyatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan, dimana disebutkan bahwa izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diberikan oleh Polri.

²⁶ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, hlm. 8.

²⁷ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 168.

Adapun cara memperoleh izin tersebut dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada²⁸:

- a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan provinsi;
- b. Kapolres/kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota;
- c. Kapolsek/kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan Desa.

Permohonan sebagaimana dimaksud, diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut²⁹ :

- a. Foto copy KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan;
- b. Waktu penyelenggaraan;
- c. Jenis kegiatan;
- d. Perkiraan jumlah peserta;
- e. Peta lokasi kegiatan serta jalan alternative yang akan digunakan; dan

²⁸ Perkapolri No. 10 Tahun 2012 Pasal 17 Ayat 2

²⁹ Perkapolri No.10 Tahun 2012 Pasal 17 Ayat 3

- f. Surat rekomendasi dari (a) Satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi; (b) Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan hubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten/kota; dan (c) Kepala desa/lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan.

Di dalam Pasal 17 ayat 4 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Jalan dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas diberikan pengecualian pemberian izin secara lisan, dimana disebutkan penggunaan Jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Proses pemberian izin dijelaskan pada Pasal 18 yaitu³⁰,

- (1) Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), setelah menerima permohonan izin, segera mempertimbangkan dan memberikan jawaban dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut, dengan menerbitkan surat pemberian izin atau surat penolakan izin.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pengamanan dan menempatkan petugas pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan

³⁰ Perkapolri No.10 Tahun 2012 Pasal 18

kegiatan tersebut untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas;

- (3) Petugas yang ditempatkan pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menghimbau kepada penyelenggara dan peserta kegiatan untuk:
 - a. tidak merusak fungsi Jalan;
 - b. tidak merusak fasilitas umum yang berada di Jalan atau sekitar lokasi kegiatan; dan
 - c. membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

3. Pengertian Sanksi

Setiap peraturan pasti ada saja yang melanggar dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. akan mendapatkan sanksi.

a. Pengertian Sanksi.

Sanksi adalah akibat dari sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas sesuatu perbuatan. Dalam hal perbuatan yang penting bagi hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang bertugas mempertahankan tata tertib masyarakat. Dalam hal pelanggaran sesuatu peraturan hukum biasanya yang bertindak terhadap pelanggar ialah pemerintah. Dengan perantaraan alat-alat pakasanya pemerintah dapat memaksa tiap-tiap orang berkelakuan menurut kaidah-kaidah tata tertib masyarakat, terutama tata tertib hukum dalam masyarakat³¹.

³¹ E. Utrecht, 1966, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, hlm. 17.

Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara. Berdasarkan definisi ini maka unsur-unsur sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu, alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, dan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan.

Pelaksanaan suatu sanksi pemerintahan berlaku sebagai suatu keputusan (ketetapan) yang memberi beban. Hal ini membawa serta hakekat (sifat) dari sanksi. Bagi jenis tindakan-tindakan penguasa terkandung secara khusus adanya asas kecermatan dalam makna asas umum pemerintahan yang layak. Hanya dalam hal-hal tidak ada penangguhan tindakan tata usaha Negara dapat dan harus segera bertindak (tanpa terlebih dahulu memberitahu pada warga dan memberi kesempatan padanya untuk mengajukan pembelaan)³².

Hukuman atau sanksi adalah tanggungan atau tindakan yang sifatnya tidak mengenakan atau menimbulkan penderitaan atau pembebanan, diberikan kepada pihak pelaku yang berperilaku menyimpang. Hukuman yang diberikan itu sebanding dengan kualitas penyimpangan yang dilakukan.

³² Philipus M. Hadjon, dkk., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 247.

Pemberian hukuman tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Pemberian hukuman dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dan yang dimaksud sebagai pihak yang berwenang sangat tergantung pada konteks persoalannya. Misalnya, dalam konteks kehidupan sosial pihak yang berwenang memberikan hukuman ialah polisi atau pengadilan.

b. Jenis-Jenis Sanksi

Dalam sistem penegakan hukum Indonesia sanksi merupakan salah satu instrument penegakan hukum yang cukup efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun jenis-jenis sanksi yang dimaksud antara lain;

(1) Sanksi hukum pidana

Pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi³³. Sanksi pidana juga merupakan ancaman yang dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

³³ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, tapi tidak jarang sanksi pidana dijadikan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia.

(2) Sanksi hukum perdata

Dalam hukum perdata, bentuk hukumannya dapat berupa:

- (a) Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban); dan
- (b) Hilangnya suatu keadaan hukum.

Dalam praktiknya, hakim yang mengadili dan memutus perkara perdata juga dapat menghukum pihak yang berperkara berupa: (1) Pembayaran ganti rugi materiil; dan (2) Pembayaran ganti rugi immateriil.

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) disebut bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang (pihak) lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

(3) Sanksi Administrasi/Administratif

Sanksi administrasi/administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa:

1. Denda;
2. Pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin;
3. Penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi;
4. Tindakan administratif.

Berdasarkan pasal 17 ayat (2) Perkapolri no. 10 tahun 2012 Tentang pengaturan lalu lintas dan jalan bahwa yang berwenang memberikan izin dan menjatuhkan sanksi administratif penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas khususnya kegiatan yang menggunakan jalan Desa/Kelurahan ialah pejabat Polri setempat dalam hal ini Kapolsek/Kapolsekta.

- c. Sanksi Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang Bersifat Pribadi Bagi yang Melanggar Ketentuan Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas mempunyai sanksi yang telah diatur dalam undang-undang. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenai

sanksi administratif³⁴. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa³⁵:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara pelayanan umum;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Denda administratif;
- e. Pembatalan izin; dan/atau
- f. Pencabutan izin.

C. Tinjauan Umum Tentang Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum sekaligus keinginan para pencari keadilan dalam kenyataan. Keinginan-keinginan hukum dalam konteks ini adalah pikiran-pikiran badan pembuat hukum (Undang-Undang) yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Perumusan pembuat hukum dituangkan dalam peraturan perundangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan³⁶. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang

³⁴ UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 136 Ayat 1

³⁵ UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 136 Ayat 2

³⁶ Nomenson Sinamo, *Loc.cit*, hlm. 153.

abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. di kenyataan³⁷.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut ditaati. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal³⁸. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto, agar hukum dapat berfungsi baik maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang ada yaitu:

- (1) hukum atau peraturan itu sendiri,
- (2) mentalitas petugas yang menegakkan hukum,
- (3) fasilitas yang diharapkan dalam mendukung pelaksanaan hukum,
- (4) kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku anggota masyarakat³⁹.

³⁷ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 291-292

³⁸ Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, hlm. 13.

³⁹ Nomeson Sinamo, *Loc.cit*, hlm. 154

Menurut P. Nicolai dan kawan-kawan seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi “pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan penerapan kewenangan sanksi pemerintahan⁴⁰ .

Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional. Akan tetapi, menjadi tugas dari setiap orang. Tugas penegakan hukum tidak hanya diletakkan di pundak polisi. Penegakan hukum adalah tugas dari semua subjek hukum dalam masyarakat⁴¹.

Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain⁴²:

1. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan

⁴⁰ P. Nicolai, et. al., *Bestuursrecht*, dalam Ridwan HR, op. cit, hlm. 296

⁴¹ Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 292-293

⁴² Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 3.

yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.

2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.
3. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

5. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak -nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut, dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan esensi dari penegakan hukum serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang Bersifat Pribadi dengan Penutupan Jalan di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan melakukan penutupan yang terjadi di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal, dimana penutupan jalan tersebut dilakukan untuk beberapa jenis kegiatan yaitu penutupan jalan untuk acara pesta pernikahan, khitanan, dan syukuran. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa terdapat permasalahan pada pelaksanaan penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal, yaitu:

1. Pernikahan

- a. Jalan Semanggi 3 pada tanggal 1 Agustus 2020, terjadi penutupan jalan dimana tidak terdapat rambu-rambu sementara dan petugas kepolisian yang mengatur pengalihan arus lalu lintas. Kegiatan dilakukan pada hari Sabtu malam, dimana pada saat tersebut pada umumnya sering terjadi kemacetan di jalan semanggi 3 dan sekitarnya sehingga penutupan jalan yang dilakukan memperparah kemacetan yang terjadi di sekitar lokasi acara. Pihak penyelenggara acara yang ditemui penulis

menyatakan bahwa beliau telah mendapatkan izin penutupan jalan secara lisan dari pihak pemerintah daerah setempat, dalam hal ini RT/RW, namun tidak memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh Polri.

- b. Jalan Semanggi Raya pada tanggal 15 Desember 2020, terdapat acara pernikahan dimana penyelenggara acara menutup seluruh badan jalan sementara tidak terdapat rambu-rambu sementara yang memadai untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas sehingga beberapa pengguna jalan terkecoh dan harus memutar balik karena tidak mengetahui atau mengira penutupan jalan sudah selesai. Penyelenggara acara yang penulis temui mengatakan bahwa ia sudah meminta izin kepada pihak RT/RW setempat untuk melakukan penutupan jalan. Namun, ketika ditanyakan soal peraturan yang berlaku tentang penutupan jalan dimana harus memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh Polri, beliau tidak mengetahui adanya peraturan tersebut.

Terdapat satu hal yang sangat jelas bahwa semua kegiatan dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari Polri dikarenakan penyelenggara acara tidak mengetahui adanya peraturan terkait izin penutupan jalan tersebut. Sebagian besar penutupan jalan dilakukan hanya dengan memiliki izin tidak resmi baik itu dari RT/RW atau kelurahan secara lisan.

2. Khitanan

- a. Jalan Angsana Raya pada tanggal 5 Maret 2021, tidak memiliki izin penutupan jalan.
- b. Jalan Palaraya pada tanggal 13 Desember 2020, penyelenggara acara hanya meminta izin penutupan jalan kepada RT/RW setempat.

3. Syukuran

Jalan Palaraya (Depan Pala 5 Barat) pada tanggal 29 Oktober 2020, penyelenggara acara hanya meminta izin penutupan jalan kepada RT/RW setempat.

Dari beberapa kasus yang dijelaskan di atas, penulis menelusuri permasalahan yang terjadi dan menemukan bahwa sebagian besar penutupan jalan yang bersifat pribadi di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal tidak memiliki izin tertulis untuk penutupan jalan dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan Kanit Lantas Polsek Kramat Kabupaten Tegal terkait dengan permasalahan penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi ini, beliau menyebutkan bahwa hampir semua penutupan jalan yang terjadi di wilayahnya tidak memiliki izin. Beliau mengatakan, "Kalau penutupan

jalan seperti pesta pernikahan, selama ini memang tidak pernah ada masyarakat yang datang meminta izin untuk itu (penutupan jalan). Jadi kita dari Lantas juga sering terlambat tahu kalau ada acara yang menutup jalan. Nanti kalau sudah acara lalu terjadi kemacetan, baru ada laporan (soal kemacetan), jadi mau tidak mau kita cuma bisa langsung turunkan anggota lantas untuk mengatur jalan.”

Pada dasarnya seseorang dapat mengadakan kegiatan yang menutup jalan selama kegiatan tersebut telah mendapatkan izin penggunaan jalan dari Polri atau dalam hal kegiatan pribadi izin dikeluarkan oleh Polsek setempat. Perizinan mengenai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas tersebut diatur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan. Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Di dalam pasal 15 ayat (2) sampai (4) disebutkan:

- (2) Penggunaan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif.
- (4) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

Kanit Lantas Polsek Kramat Kabupaten Tegal mengatakan bahwa dari beberapa kasus kegiatan penutupan jalan di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal, sebagian masyarakat mengakui memang tidak memiliki

izin, sementara sebagian lagi hanya memiliki izin keramaian dari pemerintah setempat atau dalam hal ini pihak kelurahan dan mereka mengira izin keramaian tersebut sudah cukup. Padahal izin keramaian dan izin penutupan jalan adalah dua hal yang berbeda karena izin penutupan jalan terkait dengan kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas di daerah setempat sementara izin keramaian terkait dengan gangguan keributan atau hal lainnya yang akan terjadi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan.

Izin penutupan jalan yang bersifat pribadi secara khusus di atur di penutupan jalan yang bersifat pribadi secara khusus di atur di dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan, dimana pemohon bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dimohonkan sementara pihak Kepolisian bertanggung jawab mengatur arus lalu lintas yang terganggu karena adanya penutupan jalan.

Prosedur untuk mengajukan izin penutupan jalan seperti dijelaskan di bawah ini, yaitu⁴³:

Pasal 17

- (1) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan oleh Polri.
- (2) Tata cara memperoleh izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:
 - a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan nasional dan provinsi;
 - b. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan kabupaten/kota;

⁴³ Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

- c. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan Jalan desa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan;
 - b. waktu penyelenggaraan;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. perkiraan jumlah peserta;
 - e. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan
 - f. surat rekomendasi dari:
 - 1. satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan nasional dan provinsi;
 - 2. satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan kabupaten/kota; atau
 - 3. kepala desa/lurah untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan.
- (4) Dalam hal penggunaan Jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 18

- (1) Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), setelah menerima permohonan izin, segera mempertimbangkan dan memberikan jawaban dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut, dengan menerbitkan surat pemberian izin atau surat penolakan izin.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pengamanan dan menempatkan petugas pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas.
- (3) Petugas yang ditempatkan pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menghimbau kepada penyelenggara dan peserta kegiatan untuk:
 - a. tidak merusak fungsi Jalan;
 - b. tidak merusak fasilitas umum yang berada di Jalan atau sekitar lokasi kegiatan; dan

- c. membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dari penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa selain penutupan jalan untuk prosesi kematian, maka penutupan jalan untuk kegiatan lainnya termasuk yang bersifat pribadi harus memiliki izin tertulis. Hal ini bertujuan demi terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Dengan adanya izin penutupan jalan, maka akan tercipta koordinasi antara masyarakat dan pihak polisi lalu lintas sehingga arus lalu lintas tidak terganggu.

Dengan adanya izin penutupan jalan, maka akan tercipta koordinasi antara masyarakat dan pihak polisi lalu lintas sehingga arus lalu lintas tidak terganggu. Jika masyarakat yang ingin melakukan penutupan jalan mengajukan permohonan izin, maka sesuai dengan peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012, pihak Polri, atau Polsek setempat dapat melakukan tinjauan ke lokasi kegiatan untuk melihat apakah penutupan jalan memungkinkan dilakukan atau tidak. Misalnya jika tidak dimungkinkan penutupan seluruh badan jalan karena tidak adanya jalan alternatif, pihak Polsek dapat memberikan saran agar hanya dilakukan penutupan sebagian badan jalan.

Dari pemantauan yang dilakukan penulis terhadap penutupan jalan yang bersifat pribadi di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal, sebagian besar memang tidak terdapat anggota Polisi Lalu Lintas yang mengatur arus lalu

lintas. Atau walaupun ada maka Polantas sering terlambat datang ke lokasi penutupan jalan sehingga kemacetan arus lalu lintas telah terjadi di lokasi tersebut jika merunut pada pengakuan Kanit Lantas Polsek Kramat. Sementara menurut aturan mengharuskan setiap penutupan jalan yang dilakukan selain harus ada jalan alternatif, harus terdapat petugas Polantas di ruas-ruas jalan yang mengatur lalu lintas dan terdapat rambu-rambu sementara.

Bahwa pihak kepolisian juga tidak bisa berbuat banyak jika mengetahui ada masyarakat yang sudah terlanjur melakukan penutupan jalan, misalnya pada acara pernikahan. Pihak Polsek tidak mungkin meminta kepada orang yang menutup jalan untuk menurunkan tenda yang telah terpasang karena kegiatan telah berlangsung. Beliau mengatakan bahwa jika laporan penutupan jalan terlambat diterima dan kemacetan telah terjadi, maka yang bisa dilakukan hanyalah segera mengirimkan petugas untuk mengatur arus lalu lintas dan mengurai kemacetan.

Dengan banyaknya kasus penutupan jalan yang bersifat pribadi yang tidak memiliki izin, maka salah satu akibat langsungnya adalah tidak adanya data-data yang dimiliki oleh Kepolisian terkait dengan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan melakukan penutupan. Pengakuan Kanit Lantas Polsek bahwa sebagian besar penutupan jalan yang bersifat pribadi dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak Kepolisian menguatkan fakta ini.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pihak kepolisian hanya memiliki satu data mengenai penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi dapat berdampak kepada kurang maksimalnya penelitian terkait UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ khususnya penggunaan jalan selain kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan penutupan jalan. Tidak adanya data, baik itu data penutupan jalan yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin, menjadikan pihak yang bertanggung jawab untuk membuat aturan baik itu DPR, Menteri, maupun Kapolri akan kesulitan untuk mengetahui fakta di lapangan jika di kemudian hari akan dibentuk peraturan baru atau revisi peraturan lama terkait dengan penggunaan jalan selain kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi. Salah satu contohnya adalah aturan mengenai sanksi pelanggaran terhadap penutupan jalan yang bersifat pribadi.

Kurangnya masyarakat yang mengajukan permohonan izin penutupan jalan ketika akan mengadakan kegiatan yang bersifat pribadi menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas masih lemah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dengan menutup jalan yang bersifat pribadi di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Sebagian besar penutupan jalan yang dilakukan tidak memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagian masyarakat hanya meminta izin secara lisan kepada pihak pemerintah daerah setempat baik itu RT/RW maupun kelurahan.

Penutupan jalan yang dilakukan tanpa izin yang dikeluarkan oleh Polri sebagian besar menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Hal ini memang wajar saja terjadi, karena tanpa adanya izin yang sah, maka penutupan jalan yang dilakukan juga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti rambu-rambu sementara yang menandakan adanya penutupan jalan yang tidak memadai dan tidak terdapat petugas dari kepolisian yang mengatur pengalihan arus lalu lintas. Hal ini terjadi utamanya pada penutupan jalan untuk acara dengan skala besar seperti pesta pernikahan, meskipun pada beberapa kasus acara seperti khitanan juga menyebabkan kemacetan kecil.

Pada beberapa kasus seperti acara pesta pernikahan, sebagian penyelenggara acara yang melakukan penutupan jalan hanya meminta izin kepada pihak RT/RW atau kelurahan setempat. Bahkan pada skala acara yang lebih kecil seperti khitanan dan acara syukuran, beberapa penyelenggara acara tidak memiliki izin penutupan jalan sama sekali

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang Bersifat Pribadi dengan Penutupan Jalan di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal

Dasar hukum penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas. Tujuan dibentuknya kedua peraturan tersebut adalah agar terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Dimana ketertiban lalu lintas yang diharapkan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai hak dan kewajiban setiap pengguna jalan⁴⁴. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa sebagian besar penggunaan jalan yang bersifat pribadi dengan penutupan jalan di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal dilakukan tanpa memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kedua peraturan tersebut masih lemah. Lemahnya penegakan peraturan tersebut dapat mengakibatkan gangguan dalam ketertiban lalu lintas, yang secara tidak langsung berarti terdapat hak dan kewajiban pengguna jalan yang

⁴⁴ Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

tidak terpenuhi sesuai keadaan yang diharapkan. Salah satu prinsip dibentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas adalah prinsip legalitas, yaitu pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banyaknya pelanggaran terhadap penutupan jalan yang bersifat pribadi berarti bahwa prinsip legalitas seperti yang diharapkan tersebut saat ini belum terpenuhi. Hasil pengamatan penulis menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keadaan ini, antara lain:

a. Faktor Hukum (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku)

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan tentang penutupan jalan telah mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan untuk pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dengan menutup jalan. Di dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas terdapat himbauan kepada masyarakat dan pihak Polri untuk menjaga ketertiban arus lalu lintas dan menjaga fungsi jalan, keamanan, dan ketertiban umum yaitu pada pasal 18 ayat 3. Sementara itu, di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 136 ayat 2 dijelaskan

mengenai sanksi administratif terhadap pelanggaran kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi yaitu, (a). Peringatan tertulis, (b). Penghentian sementara kegiatan, (c). Denda administratif, (d). Pembatalan izin, (e). Pencabutan izin.

Permasalahan utama yang dibahas di dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penutupan jalan yang tidak memiliki izin, jadi sanksi Pembatalan atau pencabutan izin menjadi tidak relevan dengan konteks pembahasan dalam penelitian ini. Sementara itu, sanksi peringatan tertulis merupakan sanksi ringan yang sering diabaikan oleh masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Kanit Lantas Polsek Rappocini bahwa ketika ditemukan adanya penutupan jalan yang bersifat pribadi yang tidak memiliki izin, maka yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan teguran kepada penyelenggara acara.

Sanksi lain adalah sanksi pidana, denda administratif, dan penghentian sementara kegiatan. Di dalam Pasal 274 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan: “Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Dari penjelasan di atas sebenarnya terlihat jelas bahwa sanksi pidana dan sanksi administratif telah di atur di dalam undang-undang. Kemacetan arus lalu lintas, atau terhambatnya arus lalu lintas yang diakibatkan oleh penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi, yang dilaksanakan tanpa izin dapat dikategorikan termasuk dalam gangguan fungsi jalan seperti disebutkan dalam peraturan di atas.

Sanksi denda dan penghentian kegiatan ini sebenarnya sudah lebih berat dibandingkan dengan teguran tertulis. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu unsur penting dibuatnya undang-undang dimana undang-undang tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah memperbolehkan pemberian izin untuk penggunaan jalan di luar fungsi utama jalan yang salah satunya adalah penutupan jalan, dengan syarat-syarat dan kondisi tertentu seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 127 sampai dengan pasal 129. Sementara itu proses pemberian izin tersebut telah diatur di dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aturan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang

terdapat pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu telah dijelaskan mulai dari proses perizinan sampai dengan pemberian sanksi secara bertahap baik itu sanksi pidana maupun sanksi administratif. Hal ini menunjukkan bahwa faktor hukum sudah bisa memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud disini adalah pihak Kepolisian itu sendiri yang dibantu oleh pihak Pemerintah setempat yaitu RT/RW, Kelurahan, sampai pemerintah tiap Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tegal. Dalam hal ini, tindakan nyata yang dilakukan oleh RT/RW, pemerintah kelurahan, maupun Polri sebagai penegak hukum dalam penegakan peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi yang dilakukan oleh masyarakat Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal.

Di dalam Pasal 19 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas disebutkan

bahwa, “Dalam hal penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang mengakibatkan dilakukan penutupan Jalan dan pengalihan arus lalu lintas melalui Jalan alternatif, petugas yang ditempatkan pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib memantau situasi kondisi lalu lintas di tempat tersebut.”

Dari redaksi di atas secara jelas disebutkan bahwa petugas yang berada di lokasi penutupan jalan wajib memantau kondisi lalu lintas di tempat tersebut. Namun, banyaknya warga masyarakat yang melakukan penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi tanpa izin menjadikan tidak adanya petugas kepolisian yang memantau dan mengawasi kegiatan lalu lintas di lokasi tersebut. Hal ini membuat pihak kepolisian sangat bergantung kepada laporan masyarakat atau anggota Intelijen untuk melaporkan jika terdapat penutupan jalan yang mengganggu ketertiban lalu lintas.

Dari hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa petugas lantasi dari Kepolisian sering terlambat atau bahkan tidak ada di lokasi kemacetan yang diakibatkan oleh penutupan jalan yang bersifat pribadi yang tidak memiliki izin. Hal ini juga diakui oleh Kanit Lantas Polsek yang mengatakan jika penutupan jalan dilakukan tanpa izin, maka pihaknya hanya bergantung kepada laporan masyarakat dan anggota intelijen jika hal tersebut mengakibatkan kemacetan.

Menurut pendapat penulis, pihak Kepolisian sebenarnya dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal ini dengan bersikap proaktif dan lebih tanggap jika terjadi kejadian serupa dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Salah satu bentuk pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada pihak pemerintah setempat, baik itu pemerintah kecamatan, kelurahan, maupun RT/RW terkait peraturan tentang penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan penutupan jalan untuk dilanjutkan dengan pemberitahuan kepada masyarakat di daerah masing-masing. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan seperti dengan menghimbau kepada pihak pemerintah daerah untuk memberitahukan kepada masyarakat yang ingin melakukan penutupan jalan untuk mengajukan permohonan izin penutupan jalan ke Polsek setempat.

Di dalam pasal 17 ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, dijelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan izin penutupan jalan ke pihak Kepolisian, pemohon terlebih dahulu harus sudah memiliki surat rekomendasi dari kepala desa/lurah setempat untuk penggunaan jalan di daerah yang dimohonkan.

Pasal ini secara tidak langsung memberitahukan bahwa diperlukan koordinasi yang baik antara pihak kepolisian dan

pemerintah setempat dalam penegakan peraturan ini. Pihak pemerintah setempat, dalam hal ini RT/RW dan kelurahan, diharapkan sudah mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi, sehingga pemerintah setempat dapat memberitahukan warganya sekaligus memberikan surat rekomendasi izin jika ingin melakukan penutupan jalan.

Bahwa pada sebagian kasus, ketika pihak kepolisian menemukan adanya penutupan jalan tanpa izin seperti acara pernikahan, pihak penyelenggara acara beralasan sudah meminta izin dan memberitahu pihak kelurahan atau RT/RW. Padahal menurut peraturan perundang-undangan, izin untuk penutupan jalan yang sah hanya izin tertulis yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa sebagian masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pribadi dengan melakukan penutupan jalan walaupun tidak mengetahui peraturan yang berlaku, mereka tetap menginginkan adanya legalitas dalam kegiatannya. Jika pihak Kepolisian bersikap lebih proaktif dalam penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu dalam sosialisasi peraturan maupun dalam melakukan pengawasan serta telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat, maka hal ini bisa

dihindari di masa mendatang. hal ini bisa dihindari di masa mendatang.

Penegak hukum, dalam hal ini Polri, juga seharusnya dapat lebih tegas dalam menegakkan peraturan terkait penutupan jalan untuk kegiatan pribadi. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa salah satu jenis sanksi yang dapat diberikan jika terjadi pelanggaran penutupan jalan adalah pemberhentian sementara kegiatan. Namun seperti yang dikatakan oleh Kanit Lantas bahwa atas dasar pertimbangan moralitas pihak kepolisian tidak dapat serta merta menghentikan kegiatan misalnya jika acara pesta pernikahan sudah terlanjur dilaksanakan atau pada acara prosesi kematian.

Di dalam pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas dijelaskan bahwa prinsip peraturan tersebut adalah prinsip nesesitas dan prinsip kewajiban umum. Prinsip nesesitas yaitu pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dilaksanakan atas pertimbangan kepentingan yang tidak bisa dihindarkan karena situasi kondisi yang dihadapi. Sementara prinsip kewajiban umum yaitu setiap Petugas wajib melakukan tindakan pengaturan lalu lintas dalam rangka memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Berdasarkan dua prinsip tersebut, maka hal yang bisa dilakukan oleh Polri dalam menegakkan peraturan jika sudah terlanjur terjadi penutupan jalan yang tidak memiliki izin adalah setiap petugas Polri diwajibkan untuk melakukan tindakan pengaturan lalu lintas. Langkah penegakan hukum lainnya seperti pemberian sanksi dan tindakan pengawasan dapat dilakukan selanjutnya.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa sampai saat ini, belum ada pelaksanaan pemberian sanksi baik itu berupa denda administratif maupun pemberian sanksi pidana. Hal ini ditunjukkan bahwa tidak terdapat data laporan adanya sanksi pidana maupun denda administratif yang diberikan terhadap pelanggaran penutupan jalan. Penulis hanya menemukan adanya sanksi teguran lisan terhadap pelanggar penutupan jalan berdasarkan pengakuan Kanit Lantas Polsek. Namun, dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tidak menemukan data berupa laporan teguran tertulis yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian belum berjalan maksimal yaitu dalam hal pemberian sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pelaksanaan penutupan jalan yang tidak memiliki izin.

Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran terhadap peraturan penggunaan jalan

selain untuk kegiatan lalu lintas, yaitu pihak penegak hukum dalam hal ini Polri yang kurang tegas dalam memberikan sanksi. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang belum diketahui oleh sebagian besar masyarakat diakibatkan tidak adanya sosialisasi yang menyeluruh yang dilakukan oleh pihak Polri.

c. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang dimaksudkan disini berkaitan sangat erat dengan tingkat kepatuhan dan pemahaman hukum masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penutupan jalan yang bersifat pribadi. Salah satu faktor utama yang menyebabkan banyaknya pelanggaran terhadap pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan penutupan adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan hukum masyarakat Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal yang memang masih kurang. Sebagian besar bahkan hampir semua masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan mengenai penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi baik itu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan. Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, sehingga mereka juga tidak sadar dengan

konsekuensi yang diakibatkan jika pelaksanaan penutupan jalan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagian masyarakat Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal masih menganggap bahwa proses perizinan tidak terlalu diperlukan, atau jika ada yang sadar untuk memiliki izin mereka mengajukan ke pihak kelurahan atau RT/RW setempat kelurahan atau RT/RW setempat yang tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan izin penutupan jalan. Ketika ditanyakan terkait peraturan pelaksanaan penutupan jalan yaitu Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Selain permasalahan di atas, beberapa masyarakat yang penulis temui selain tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang berlaku, mereka memang abai atau tidak peduli jika kegiatan penutupan jalan yang dilakukan akan menyebabkan kemacetan dan merugikan warga masyarakat pengguna jalan lainnya.

Dari beberapa penjelasan di atas terlihat jelas bahwa sebagian besar masyarakat Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal memang tidak mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yaitu UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Jalan dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan. Namun , dapat dilihat

bahwa sebagian masyarakat ternyata memiliki inisiatif untuk melaporkan tindakan penutupan jalan yang dilakukan terhadap pihak pemerintah setempat, baik itu RT/RW maupun pihak kelurahan.

Kepala Desa Mejasem Barat, dalam wawancara yang dilakukan menuturkan kepada penullis bahwa selama ini memang ada beberapa masyarakat yang datang melapor ke kelurahan jika ingin melakukan kegiatan dengan menutup jalan. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa ada juga sebagian masyarakat yang tidak langsung mendatangi kelurahan, namun hanya memberitahukan penutupan jalan yang akan dilakukan kepada pihak RT/RW setempat, utamanya pada kegiatan-kegiatan yang berksala kecil seperti khitanan atau acara syukuran.

Pernyataan tersebut serupa dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Mejasem Barat, dimana beliau mengatakan: "Memang ada beberapa warga disini yang datang melapor kalau mau tutup jalan. Tapi sebagian besar penutupan jalan baru kami ketahui pada saat pertemuan-pertemuan yang dilakukan dengan RT/RW disini. Rata-rata ketua RT/RW melaporkan masyarakat datang ke mereka kalau mau tutup jalan. Ya kita kasih izin saja selama ada rambu-rambu disediakan oleh masyarakat yang mau menutup jalan."

Salah satu indikator yang menunjukkan kurangnya tingkat pengetahuan hukum masyarakat adalah kurangnya laporan maupun permohonan izin penutupan jalan yang masuk ke pihak kepolisian. Seperti dengan yang diungkapkan Kanit Lantas Kramat dalam

wawancara yang dilakukan penulis, dimana beliau mengatakan: “Selama ini memang belum pernah ada masyarakat yang datang ke Polsek untuk minta izin penutupan jalan. Saya rasa karena masih banyak warga kita yang belum menyadari pentingnya perizinan itu, walaupun memang harus diakui kalau sebagian besar (masyarakat) belum tau soal itu peraturan karena ada beberapa kali saat kita datangi masyarakat yang sedang menutup jalan mereka bilang tidak tau kalau harus ada izin dari kepolisian.”

Hal ini menunjukkan satu hal penting, yaitu bahwa pada dasarnya tingkat pengetahuan hukum masyarakat Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal terkait peraturan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan menutup jalan memang masih kurang. Namun, salah satu permasalahan yang harus digaribawahi adalah meskipun sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ maupun Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Jalan dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan, masih banyak masyarakat yang menyadari tentang keharusan untuk memiliki izin untuk melakukan penutupan jalan dimana hal ini ditunjukkan oleh masyarakat yang meminta izin kepada pihak RT/RW maupun kelurahan setempat.

Tingkat pemahaman hukum dan pengetahuan hukum adalah dua indikator yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum

masyarakat dimana kesadaran hukum pada dasarnya adalah cara pandang masyarakat terhadap hukum itu sendiri, apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan kepada hak-hak orang lain.

Pemahaman Hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dalam konteks permasalahan ini adalah, peraturan hukum itu sendiri, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ maupun Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Jalan dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, dimana terlihat bahwa sebagian besar masyarakat tidak memahami isi dari kedua peraturan perundang-undangan tersebut dikarenakan tingkat pengetahuan hukum masyarakat terhadap kedua peraturan tersebut yang masih kurang atau bahkan tidak ada. Pengetahuan Hukum, yang berarti pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Di dalam Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan secara eksplisit tertulis bahwa izin penutupan jalan yang sah adalah yang dikeluarkan oleh Polri dimana masyarakat yang ingin melakukan penutupan jalan untuk kepentingan pribadi melakukan permohonan izin kepada Polsek

setempat setelah mendapatkan rekomendasi dari pihak pemerintahan yaitu RT/RW dan kelurahan setempat.

Dalam konteks penelitian ini, terlihat bahwa sebagian masyarakat menyadari bahwa mereka diperbolehkan untuk melakukan penutupan jalan selama memiliki izin. Namun karena mereka tidak mengetahui peraturan yang khusus tentang perizinan penutupan jalan tersebut dimana mereka harus memiliki izin dari Polri, maka mereka meminta izin ke pihak pemerintah setempat yaitu RT/RW maupun kelurahan.

Pada dasarnya, kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan.

Untuk meningkatkan kesadaran hukum, dalam hal ini tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal terkait peraturan mengenai penutupan jalan yang bersifat pribadi ini, salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sembilan orang yang penulis temui, semuanya mengatakan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pemberitahuan soal peraturan perundang-undangan terkait dengan penutupan jalan yang bersifat pribadi.

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu hal yang dapat dilakukan oleh Polri sebagai penegak hukum adalah dengan meningkatkan pengawasan peraturan penutupan jalan. Salah satu langkah pengawasan tersebut adalah pihak Kepolisian dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat yaitu kelurahan, RT dan RW untuk melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait penutupan jalan, seperti dengan melakukan pertemuan antara pihak-pihak terkait dari Kepolisian, Kecamatan, Kelurahan, RT/RW, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Dengan banyaknya kegiatan penggunaan jalan yang bersifat pribadi dengan penutupan jalan tanpa izin diakibatkan oleh masyarakat yang tidak mengetahui peraturan-peraturan penutupan jalan. Akibatnya penutupan jalan dapat berlangsung tidak sesuai aturan seperti tidak adanya jalan alternatif, rambu lalu lintas sementara tidak ada/tidak memadai, atau bahkan kegiatan penutupan jalan dapat merusak konstruksi jalan.

Hal ini tidak sepenuhnya merupakan kesalahan masyarakat karena memang belum pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Polri dengan pemerintah setempat dan masyarakat. Dengan sosialisasi peraturan yang dilakukan Polri dan pemerintah dengan masyarakat, maka tingkat kesadaran hukum, yang berarti pemahaman dan pengetahuan hukum, masyarakat dapat ditingkatkan sehingga penegakan hukum peraturan perundang-undangan penutupan jalan

dapat berjalan dengan lebih baik. kesadaran hukum, yang berarti pemahaman dan pengetahuan hukum, masyarakat dapat ditingkatkan sehingga penegakan hukum peraturan perundang-undangan penutupan jalan dapat berjalan dengan lebih baik.

d. Faktor Sarana/Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas yang mempengaruhi penegakan hukum mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup dimana hal-hal tersebut adalah yang terkait dengan penegak hukum yaitu Polri. Tenaga manusia yang terampil serta organisasi yang baik terkait dengan kemampuan dan tingkat pendidikan tiap petugas Polri dalam menangani tiap keadaan pengaturan jalan pada saat penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Sementara fasilitas peralatan dan keuangan yang cukup ditandai dengan fasilitas yang digunakan oleh petugas Polri dalam melakukan pengaturan lalu lintas jalan pada saat penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas seperti kendaraan bermotor yang digunakan sampai dengan alat-alat bantu serta rambu-rambu sementara yang telah dianggarkan untuk pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu.

Pada dasarnya, sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Polri sudah cukup memadai dalam mendukung penegakan hukum penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat

pribadi dengan melakukan penutupan jalan. Di dalam pasal 4 sampai pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Jalan dalam Keadaan Tertentu dan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas telah dijelaskan tentang tindakan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu yang dapat dilakukan petugas Polri, salah satunya adalah saat terjadi penutupan jalan. Mulai dari isyarat-isyarat sampai dengan langkah-langkah pengaturan lalu lintas yang dapat dilakukan oleh petugas lalu lintas⁴⁵. Selain itu, petugas lalu lintas Polri juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas alat bantu dan rambu-rambu sementara yang dapat digunakan untuk pengaturan lalu lintas saat terjadi penutupan jalan, yaitu :

1. Lampu rotator berwarna biru yang berfungsi sebagai peringatan bagi pengguna jalan untuk memperlambat laju kendaraan;
2. kerucut lalu lintas (*traffic cone*) sebagai peringatan dan petunjuk bagi pengguna jalan yang bersifat multifungsi; dan
3. rambu lalu lintas sementara yang berfungsi sebagai peringatan, petunjuk, larangan, dan perintah bagi para pengguna jalan untuk diikuti dan dipatuhi.
4. peluit;

⁴⁵ Pasal 4 sampai Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Jalan dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

5. megaphone;
6. lampu senter dengan pancaran warna merah;
7. rambu lalu lintas sementara dan barikade untuk situasi khusus;
8. alat komunikasi (handy talky/HT);
9. kapur tulis;
10. rompi lalu lintas; dan
11. kelengkapan perorangan lainnya.

Faktor ini juga berpengaruh pada jalannya acara penutupan jalan yang bersifat pribadi, karena jika tidak memiliki sarana atau fasilitas yang memadai maka acara yang akan diselenggarakan bisa menimbulkan kemacetan dan bisa merugikan masyarakat lain yang ingin lewat di jalan tersebut.

Dari keempat faktor yang telah dijelaskan di atas, salah satu poin penting yang terlihat adalah penegakan hukum terhadap peraturan penutupan jalan belum maksimal yang diakibatkan oleh penegak hukum yaitu pihak kepolisian yang kurang aktif dan kurang tegas dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Jalan dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain

untuk Kegiatan Lalu Lintas telah mengatur tentang pelaksanaan penutupan jalan untuk kegiatan yang bersifat pribadi mulai dari proses perizinan sampai dengan pemberian sanksi. Namun, banyaknya penutupan jalan yang tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh Polri terjadi karena masyarakat yang tidak mengetahui tentang kedua peraturan tersebut. Meskipun begitu, sebagian masyarakat yang tidak mengetahui peraturan penutupan jalan ternyata memiliki inisiatif untuk meminta izin kepada pihak pemerintah setempat, baik itu kelurahan maupun RT/RW. penutupan jalan ternyata memiliki inisiatif untuk meminta izin kepada pihak pemerintah setempat, baik itu kelurahan maupun RT/RW.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa hal tersebut bukan sepenuhnya kesalahan dari masyarakat karena tidak pernah terdapat sosialisasi peraturan dari pihak Kepolisian. Bahkan masih ada pihak pemerintah baik itu dari kelurahan maupun RT/RW setempat yang juga tidak mengetahui perihal peraturan penutupan jalan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan dapat bekerja lebih aktif dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan penutupan jalan. Pihak Polri diharapkan dapat berkoordinasi lebih baik dengan pihak Pemerintah dalam melakukan sosialisasi peraturan sehingga baik pemerintah maupun masyarakat memiliki akses dan mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan penutupan jalan untuk kegiatan pribadi. Jika masih terjadi pelanggaran

terhadap peraturan tersebut, maka pihak Polri diharapkan dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi, utamanya dalam pemberian sanksi denda administratif dan sanksi pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data yang dikumpulkan setelah dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan penutupan jalan di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal dilakukan untuk kegiatan acara pernikahan, khitanan, dan kegiatan lainnya seperti acara syukuran. Namun, sebagian besar kegiatan penutupan jalan tersebut masih berjalan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana banyak yang tidak memiliki izin tertulis dari Polri. Sebagai akibatnya, penutupan jalan tersebut menimbulkan gangguan ketertiban arus lalu lintas sehingga memperparah kemacetan yang sering terjadi di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaksanaan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan penutupan jalan di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal adalah:
 - a. Faktor Hukum
 - b. Faktor Penegak Hukum
 - c. Faktor Masyarakat
 - d. Faktor Sarana/Fasilitas

Dimana faktor penegak hukum memegang peranan penting banyaknya kasus penutupan jalan tanpa izin. Kurangnya sosialisasi dari Polri selaku penegak hukum kepada masyarakat dan pemerintah setempat mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan tentang penutupan jalan. Masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut pada akhirnya hanya meminta izin kepada pihak Pemerintah setempat yaitu kelurahan atau RT/RW, sehingga pelaksanaan penutupan jalan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta sosialisasi peraturan kepada masyarakat terkait dengan penegakan hukum penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas yang bersifat pribadi dengan menutup jalan di Wilayah Mejasem Kabupaten Tegal.
2. Pihak Penegak Hukum, yaitu Polri diharapkan dapat bekerja lebih proaktif dan lebih tegas dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Selain melakukan sosialisasi peraturan dengan menyeluruh ke segala lapisan masyarakat, Polri diharapkan dapat lebih tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adrian Sutedi, 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bagir Manan, 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung.
- Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta
- E. Utrecht, 1966. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Penerbit Balai Buku Ihtiar, Jakarta.
- Eko Sujatmiko, 2014. *Kamus IPS* , Aksara Sinergi Media Cetakan I, Surakarta.
- Indroharto, 2000. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kamal Hidjaz, 2010. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makassar
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.
- Mr. N. M. Spelt dan Ten Berge, 1992. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yuridika Pratama, Surabaya
- Nomensen Sinamo S.H., M.H., 2010. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jala Permata Aksara, Jakarta.
- N. M. Spelt dan J.B.J. Ten Berge, 1992, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yuridika Pratama, Surabaya
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 1993. *Pengantar Hukum Perijinan*, Cetakan Pertama. Yuridika, Surabaya.
- Philipus M. Hadjon, 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University, Yogyakarta.

Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan. Problem dan Upaya Pembenahan*. Grasindo, Jakarta.

Ridwan HR, 2011. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2003, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta.

Safri Nugraha, 2007, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Center For Law and Good Governance Studies (CLGS-FHUI), Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor. 10 tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Jalan.

JURNAL/ARTIKEL

Abdul Hafid Firdaus, 2019, Penutupan Akses Keluar Masuk Tetangga Ke Jalan Raya Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Agraria (Sengketa Lahan Di Desa Sudimoro, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang). **SKRIPSI**. Universitas Islam Negeri Maulana Mailik Ibrahim, Malang.

Dimas Nugraha Ginting, 2019 Tanggung Jawab Pemborong Dalam Pelaksanaan Pemborongan Bangunan. **SKRIPSI**. Universitas Katolik Parahyangan.